PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

HELMY PITOY
NIM. D01417080

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Helmi Pitoy[1], Ramlah Alkatiri[2], Joice Machmud[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: helmi_pitoy@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to determine village fund management in improving communities' economy at Karyamukti village. The method used qualitative research approach with research type is descriptive. Based on the result obtained the planning process is good because it is carried out in a participatory manner involving the community and social institutions. Likewise, the briefing has gone well. However, the organizational aspect is still not maximal because, the determination of the structure is not in accordance with the educational background and so the supervision aspect is still not running well, because the supervision that has so far been carried out by the BPD is only a formality following the habits.

Keywords: *Village Fund, Management, Economy*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil peneltian ini didapatkan bahwa proses perencanaan sudah baik karena dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Begitu pula dengan pengarahan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk aspek pengorganisasian masih terlihat belum maksima karena, penentuan struktur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan begitu pula dengan aspek pengawasan masih belum berjalan dengan baik, karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Perekonomian

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya merus melakukan upaya terjadinya peningkatan pertumbuhan nasional dengan memajukan pembangunan infrastruktur yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dilakukan guna mendukung program pembangunan nasional agar terjadinya akselerasi dalam kegiatan pembangunan. Tujuan dari adanya pembangunan dalam bidang infrastruktur dikarenakan faktor ini menjadi penggerak yang dianggap mampu dalam mempengaruhi terjadinya peningkatan dari sisi kualitas hidup serta penyejahteraan kehidupan manusia.

Pembangunan adalah sebuah proses terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau yang sebelumnya belum berpunya menjadi berpunya. Dalam kegiatan

pembangunan, pemerintah melakukan upaya-upaya agar terjadinya perubahan kehidupan yang ada dalam suatu wilayah. Kegiatan ini telah dilakukan dengan melakukan transfer anggaran yang diperuntukan bagi pemerintah desa dalam bentuk Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan desa mampu melakukan proses pembangunan yang ada di wilayahnya agar terjadi peningkatan kehidupan masyarakat. Untuk supaya dana desa ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dana tersebut harus digunakan secara transparan, bertanggungjawab, bergotong royong, dan pelibatan secara langsung masyarakat dalam pembangunan.

Dalam huruf b ayat 1 pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa sumber dari Dana Desa adalah APBN yang fokus peruntukannya sepenuhnya untuk desa, yang dalam proses pemberiannya dilakukan melalui proses transfer melalui anggaran belanja daerah di setiap Kabupaten. Dana Desa ini diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa adalah merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatannya, Dana Desa diharapkan dapat dilakukan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada atau bahan baku yang ada dalam desa tersebut serta diharapkan mampu mengoptimlakan dalam penyerapan tenaga kerja yang ada dalam wilayahnya.

Arthur Lewis dalam bahasannya mengenai pembangunan mengatakan bahwa terjadinya proses pembangunan diwilayah perkotaan dan pedesaan yang diikuti dengan terjadinya proses urbanisasi diantara wilayah kota dan desa sehingga perlu ada kebijakan yang mampu mendekatkan kesenjangan yang ada baik dari sisi infrastruktur, sosial, ekonomi dan sebagainya yang harus mampu segera di tindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadinya pelibatan masyarakat secara aktif.

Desa sangat berpotensi dalam peningkatkan pembangunan secara nasional, proses perencanaan pembangunan desa adalah merupakan suatu proses yang menjadi pedoman bagi terjadinya penggalian potensi serta gagasan dalam membangun desa yang titik beratnya pada adanya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, agar tepat sasaran. Perencanaan adalah sebagai sebuah kegiatan yang melakukan analisis dengan melakukan identifikasi dari kebutuhan masyarakat sampai dengan adanya penetapan program pembangunan yang akan dilaksanakan, semua program peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun, dan desa.

Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*,

pengarahan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*.

Sejak tahun 2015, pemerintah telah melakukan perubahan model pembangunan dengan adanya Pemberian Dana Desa (DD) kepada setiap desa yang ada di seluruh wilayah Inonesia dalam rangka melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Kegiatan adana desa sebenarnya mengganti atau merubah model dari program pemerintah sebelumnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Desa Karyamkti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satu desa yang menerima Dana Desa yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Sejak dana ini masuk ke Desa tahun 2015 terjadi peningkatan anggarannya. Berikut informasi besaran dana desa yang diterima oleh Desa Karyamukti:

Tabel 1. Pendapata dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karyamukti

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH DANA DESA
1.	2015	Rp. 266.095.000
2.	2016	Rp. 600.532.000
3.	2017	Rp. 765.436.000
4.	2018	Rp. 732.156.000
5.	2019	Rp. 949.024.000

Sumber : APBDes Karyamukti

Berdasarkan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Karyamukti dalam penggunaan Dana desa tersebut terlihat jelas adanya peningkatan secara kuantitas dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Karyamukti. Hal ini jelas sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat itu sendiri.

Sedangkan untuk pemanfaatan ataupun penggunaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Berikut uraian kegiatan dalam penggunaan dana desa tersebut.

Tabel 2. Program dan Kegiatan Yang Terdapat Di Desa Karyamukti

NO	TAHUN	JENIS PROGRAM	JENIS BANTUAN	SASARAN
1.	2015	Pembangunan	Pembangunan MCK	2 KK
			Pembangunan Jamban	5 KK
			Rehab MCK	6 KK
2.	2016	Pembangunan	MCK dan Sumur Gali	2 KK
			MCK Tanpa Sumur Gali	3 KK
			Jamban	5 KK
4.	2017	Pemberdayaan	Pelatihan Kelompok Tani	17 KK
		Pemberdayan	Pengadaan Ternak Sapi	10 KK
5.	2018	Pembangunan	Jamban	17 KK
		Pemberdayaan	Pengadaan Ternak Sapi	10 KK
6.	2019	Pemberdayaan	Pengadaan Ternak Sapi	24 KK
			UMKM	11 KK
JUMLAH				**112 KK**

Sumber: Profil Desa, 2019

Dari tabel tersebut terlihat, berbagai macam program dan bantuan telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Karyamukti dari tahun 2015 sampai dengan 2019 guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ada enam jenis bantuan yang dilakukan, diantaranya; 1) Pembangunan MCK, 2) Pembangunan Jamban, 3) Pelatihan Kelompok Tani, 4) Pengadaan Ternak Sapi, dan 6) UMKM.

Keenam bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karyamukti terbagi atas pembangunan dan pemberdayaan. Semua bantuan itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Karyamukti dengan sasaran masayarakat yang masih berada dalam kategori miskin. Namun dari data tersebut terlihat bahwa jumlah sasaran yang tersentuh oleh kegiatan tersebut hanya berjumlah 112 KK, sedangkan jumlah KK miskin yang harus tersentuh sejumlah 186 KK.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dengan beberapa masyarakat Desa Karyamukti bahwa dana Desa yang di kucurkan sejak tahun 2015 belum mencakup seluruh kepala keluarga miskin di desa karyamukti karena bantuan yang dialokasikan melalui dana desa masih kurang dalam membantu atau meningkatakan perekonomian masyarakat miskin di Desa Karyamukti, kondisi ini terjadi menurut masyarakat dikarenakan proses pemberdayaan terhadap masyarakat hanya pada saat proses pekerjaan itu berlangsung, dan hasil dari pendapatan pekerjaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang dikarenakan sifatnya hanya sesat.

Begitu pula dengan bantuan Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan dalam bentuk bantuan berupa bahan kue dan bahan kios kepada masyarakat miskin dengan persyaratan yang termasuk dalam data kelurga miskin, Pemberian bantuan itu diharapkan dapat memberikan kesinambungan usaha kecil yang mereka geluti, namun bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin karena bantuan yang diberikan hanya habis untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berbagai macam bantuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Karyamukti melalui Dana Desa, harusnya mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Karyamukti. Namun dari data kemiskinan yang ada di Desa Karyamukti, tercatat pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin adalah 186 KK dan pada tahun 2019 sejumlah 177 KK. Dari data ini menunjukkan angka kemiskinan yang ada di Desa Karyamukti masih belum turun secara signifikan karena jumlah KK yang berdampak terhadap program peningkatan perekonomian tersebut hanya berjumlah 9 KK. Dengan kata lain berbagai macam program dan bantuan yang ada di Desa Karyamukti, belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari KK-KK yang perilakunya diamati. (Sugiyono, 2012: 1-2).

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, (Sugiyono, 2014: 223). Menurut sumber datany/a dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yakni:

1. Data primer yaitu sumber yang lansung memberi data kepada peneliti, sebnyak 14 KK diantaranya adalah:
   a. Rahman Detu (Kepala Desa)
   b. Hais Nasir (Kepala Dusun)
   c. Ferawati Safrudin (Bendahara Desa)
   d. Sasmita Taliki (Kasie Kesejahteraan) dan
   e. 10 KK masyarakat miskin.
2. Data sekunder yaitu sumber data yang di dapatkan langsung dari dokumen -dokumen seperti: lewat KK lain, dokumenterkait, buku, jurnal/skripsi yang telah diteliti yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam teknik triangulasi ini banyak cara yang bisa digunakan untuk mengecek keabsahan data, adapun macam-macam triangulasi adalah:

a. Triangulasi sumber data, maksudnya peneliti mengecek derajat kepastian dan kepercayaan suatu informasi dengan hasil wawancara, serta dengan cara hasil dokumen.
b. Triangulasi dengan cara metode, maksudnya peneliti mengecek keabsahan data dari beberapa teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumen), dalam hal ini peneliti membandingkan dengan hasil informasi dari beberapa informan dalam suatu teknik yang sama (dalam suatu teknik pengumpulan data yang sama).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Fokus dalam kajian penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. George. R Terry (2006) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Melalui penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pengarahan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)* dengan uraian deskripsi penelitian sebagai berikut:

Pokok masalah dalam penelitian ini yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Dana desa belum sepenuhnya meningkatkan perekonomian masyarakat, dan 2) Dana desa untuk UKM tidak maksimal di pergunakan masyarakat.

Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis tuangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang dikemukakan oleh George. R Terry yang dikutip oleh The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pengarahan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)* dan kemudian dijadikan sebagai pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian iniPenelitian ini dilakukan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango dengan mengambil lima belas sampel yang terdiri atas : Kepala Desa, Kasie Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun dan sepuluh masyarakat. Dari survei yang dilakukan terhadap informan ditambah wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber kemudian menghasilkan data yang kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan Sebagai berikut.

a. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Karyamukti melakukan tahap perencanaan diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum itu dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat di tingkat Dusun terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Dusun. Poin-poin hasil kesepakatan dalam musyawarah dusun tersebut akan dijadikan data yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dilakukan untuk membahas hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 6 (enam) tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan

dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, Kepala Desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Karyamukti yang disusun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karyamukti.Dalam proses perencanaan pihak desa Karyamukti telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa. Yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi pemerintahan. Pengorganisasian sangatlah penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas setiap aparatur mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lainnya dan bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Seperti dalam hal pengelolaan dana Desa, secara organisasi yang bertanggung jawab adalah kepala Desa akan tetapi kepala Desa tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh para stafnya. Walaupun dengan tugas yang berbeda-beda artinya bahwa dalam melaksanakan tugas organisasi harus bergerak dalam satu komando yaitu pemimpin organisasi dalam hal ini kepala Desa, akan tetapi hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Karyamukti.

Pada aspek Pengorganisasian yang terjadi di desa Karyamukti terlihat bahwa pengorganisasian kurang maksimal karena kurangnya koordinasi antara PTPKD dan TPK. dikarenakan unsur PTPKD (Kasi Kesos) tidak terlibat secara langsung dalam proses kegiatan yang dikarenkan ketidak mampuan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang disebabkan tidak pahamnya PTPKD tersebut dalam memahami konstruksi pekerjaan,

karena latar belakang pendidikannya hanya SMA.

Pembentukan tim PTPKD harusnya berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur PTPKD berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk ditempatkan, sedangkan dalam pengorganisasian adalah usaha untuk mengkelompokkan pekerjaan yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, fungsi ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang, pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilkasanakan oelh unit-unit organisasi seperti penugasan, pelimpahan dan wewenang untuk melaksakan pekerjaan hubungan informasi vertical maupun horizontal dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien.

3. Pengarahan

gar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka dalam pengelolaan program sangat dibutuhkan adanya bimbingan, saran yang membangun bagi kelancaran suatu organisasi. Mulai sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian sampai ke tahap pengawasan tidak dilakukan pengarahan oleh kepala Desa kepada seluruh perangkat pemerintah Desa yang ada agar mereka dapat bekerja sesuai peraturan yang ada baik aturan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri maupun aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pengarahan bagi staf organisasi itu penting agar mereka tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas serta memiliki keteraturan dalam menyelesaikan pekerjaan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Karyamukti.

Berdasarkan Hasil wawancara, mengambarkan bahwa dalam aspek pengarahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti sudah baik, karena aparat Desa sudah selalu mendapat pengarahan dari kepala desa untuk bekerja sesuai dengan aturan dan program yang sudah ditentukan. Hal ini juga menunjukan bahwa pengelolaan program yang dibiayai oleh ADD sudah sesuai dengan arahan dari Pimpinan Desa Karyamukti. Disamping itu Hal ini menunjukan bahwa pengarahan berhubungan dengan pemberian motif kerja dari pimpinan kepada bawahan untuk bekerja. Oleh karena itu, pimpinan dikatakan sebagai motivator bagi bawahannya untuk bekerja dengan baik.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau diharapkan. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dana desa dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dana desa dilakukan pemantauan cek fisik dilapangan baik secara teknis maupun administrasi. Monitoring dan evaluasi dalam LPJ dilakukan oleh PLD yang

dicek secara administrasi dan dilaporkan secara bertahap. Laporan berkala biasanya dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dari segi pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Desa Karyamukti masih belum berjalan dengan baik. Karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan, dan kurang respon terhadap permasalahan Dana Desa. Seharusnya pencegahan penyimpangan pengelolaan Dana Desa bisa dilakukan sejak tahap perencanaan. Selanjutnya diawasi dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan.

Anggota BPD yang merupakan representasi masyarakat desa seharusnya menjalankan amanah pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

b. Penggunaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti.

Dari hasil wawancara diatas upaya Desa Karyamukti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih terlihat belum maksimal karena program yang dilakukan rata-rata juga dilakukan oleh Desa lainnya. Harusnya ada inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dari program Desa.

Tidak maksimalnya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Karyamukti juga disebabkan oleh adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah pusat serta pemerintah Desa terkait data BDT, padahal Desa sudah berupaya untuk melakukan pembeharuan data akan tetapi waktu pelaksanaanya data yang diturunkan oleh pemerintah pusat masih data yang lama bukan data yang sudah diperbaruhi oleh pemerintah Desa, akibatnya bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

Bahkan hal ini diperparah dengan kebiasaan masyarakat ketika menerima bantuan tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena adanya pola pikir masyarakat yang berpatokan pada bantuan itu tidak hanya sekali masih ada lagi tahap berikutnya.

Tidak maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karyamukti dalam meningkatkan ekonomi dikarenakan tidak memperhatikan prinsip sistem ekonomi, karena sistem Ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Labih lanjut Kyato Sherdan mengatakan Sistem Ekonomi adalah sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat di Desa Karyamukti dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek pengelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti berdasarkan indikator pengelolaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
   a. Dalam proses perencanaan pihak desa Karyamukti telah melaksanakannya dengan baik dikarenakan perencanaan pembangunan telah melibatkan masyarkat dan lembaga kemasyarakatan desa.
   b. Dalam aspek pengarahan pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamukti sudah baik, karena aparat Desa sudah selalu mendapat pengarahan dari kepala desa untuk bekerja sesuai dengan aturan dan program yang sudah ditentukan.
   c. Dalam aspek pengorganisasian masih terlihat belum maksimal, karena penentuan struktur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan.
   d. Dalam aspek pengawasan masih belum berjalan dengan baik, karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan.
2. Pengelolaan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian massyarakat yang ada di Desa Karyamukti juga belum efektif yang dikerenakan tidak ada inovasi terbaru terhadap program yang dilakukan, disamping itu ketimpangan data antara desa dan pusat serta pola pikir masyarakat.

Saran

1. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi instansi terhadap pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tenang objek yang sama atau yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Mentri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Bumi Aksara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa